



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00195/2025
Lampiran : 1 Halaman

31 Juli 2025

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang
Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Sukuk Mudharabah ("RUPSU") yang akan diselenggarakan pada **28 Agustus 2025 dan 29 Agustus 2025**, yaitu:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPO dan RUPSU yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Kamis, 31 Juli 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Pemerintah Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Beras Oplosan

Jakarta, HanTer - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Amran, sesuai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut akan menindak tegas peredaran beras tersebut.

"Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah," ujar Mentan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/7/2025).

Dikatakan Amran, penegekan hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjual beras oplosan, khususnya pada kategori beras medium dan premium.

Amran menjelaskan, standar pemerintah untuk

beras medium menetapkan kadar patahan (broken) maksimal 25 persen, sementara untuk beras premium maksimal 15 persen.

Namun, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras di pasaran, sebanyak 212 di antaranya ditemukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

"Bahkan ada yang broken-nya mencapai 30 persen, 35 persen, 40 persen, hingga 50 persen. Ini jelas tidak sesuai standar. Mau itu disebut oplosan atau apapun, yang jelas tidak sesuai regulasi pemerintah," tegas Mentan.

Ia menyatakan data temuan tersebut telah disampaikan kepada Kaprodi dan Jaksa Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh aparat penegak hukum, hasilnya menunjukkan kesamaan.

"Arahan Bapak Presiden jelas, tindaklanjuti. Maka semua yang tidak sesuai aturan akan ditindak oleh penegak hukum," ujarnya.

■ Danial

Dorong Pelatihan Pekerja

MENTERI P2MI SIAPKAN BADAN LAYANAN UMUM

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan badan layanan umum (BLU) untuk melaksanakan pelatihan bagi calon pekerja migran.

Jakarta, HanTer - "Program ke depan pasti ada yang bisa memfasilitasi pelatihan para calon pekerja migran ataupun mahasiswa sebelum mereka bekerja di luar negeri. Tapi, kita harus mencari dan mempersiapkan skema pembiayaannya terlebih dahulu," kata Karding dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pelatihan bagi calon pekerja migran salah satunya dengan membentuk badan layanan umum.

"Kita sekarang sedang membangun badan layanan umum migran, dan pemerintah sedang berusaha memfasilitasi pelatihan ini dengan memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) sebagai pembiayaannya," ucapnya.

Dia melanjutkan skema pembiayaan pelatihan calon pekerja migran yang tengah diupayakan melalui kredit usaha rakyat tanpa agunan, dengan bunga enam persen serta memiliki plafon maksimal sebesar Rp100 juta.

"Pembiayaan ini nanti digunakan untuk pelatihan,



MENTERI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

persiapan penempatan ke luar negeri, dan biaya hidup sementara para calon pekerja migran. Kami sedang mengupayakan ini melalui BLU migran," ungkapnya.

Menurut dia, setelah se-

mua terbentuk, pemerintah ingin membentuk pula migran fund, yang bertujuan untuk membantu pembiayaan calon pekerja migran, pekerja migran ataupun yang telah purna.

"Diharapkan bila ini sudah terbentuk calon pekerja migran kita bisa terbantu, dan pekerja migran bisa menjadi pekerja-pekerja yang profesional," ujarnya.

■ Danial

Sesmen: Perempuan Penting Dalam Pengembangan UMKM

Jakarta, HanTer - Sekretaris Kementerian (Sesmen) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Arif Rahman Hakim mengatakan proporsi pengusaha perempuan adalah 59 persen dari 17 juta populasi pelaku UMKM.

Melalui kontribusi UMKM terhadap PDB

(Produk Domestik Bruto) nasional yang mencapai lebih dari 60 persen, kata dia, ini bukan sekadar angka.

"Melainkan bukti nyata bahwa perempuan, termasuk para muslimah, adalah aktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional," ujar Sesmen Arif

dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, perempuan memegang peranan penting dalam pengembangan UMKM dan wirasaha di Indonesia. Untuk itu penguatan UMKM yang dikelola oleh perempuan perlu menjadi perhatian

sebagai fondasi ekonomi lokal dan nasional.

Namun Sesmen Arif menambahkan, masyarakat juga harus jujur melihat tantangan besar yang masih dihadapi oleh para pengusaha perempuan seperti keterbatasan akses permodalan dan pasar.

■ Danial

Kemenperin Berberkan Hilirisasi Guna Ketersediaan Bahan Baku

Jakarta, HanTer - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap mendukung rencana pemerintah untuk melakukan kebijakan hilirisasi di sektor industri kelapa, salah satunya dengan menjamin ketersediaan bahan baku.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan dari sisi ketersediaan bahan baku, pemenuhan standar, hingga mempertemukan produsen, penjual dan calon pembeli.

"Yang kita lakukan adalah (memberi) kemudahan atau menjamin ketersediaan bahan baku. Kedua itu, investasi untuk menyerap teknologi dan meningkatkan kapasitas, ketiga dari standar, keempat itu business matching," ujar Putu di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Putu menyampaikan hilirisasi merupakan program yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dukungan lain yang diberikan oleh Kemenperin adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan komoditas tersebut di dalam negeri.

"Nanti memang dari Kementerian Perindustrian sudah berusaha lah, bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Ini memang masih dalam proses," katanya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan perusahaan China berinvestasi dengan membangun pabrik hilirisasi kelapa di Indonesia.

"Dengan China ini kita cukup aktif investment-nya. Saya melihat mereka appetite-nya tetap tinggi masuk ke Indonesia dan tidak hanya di pengolahan mineral. Mereka pun masuk ke pengolahan contohnya kelapa,"

ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dia mengatakan bahwa ada industri pengolahan kelapa asal China yang sudah melakukan groundbreaking atau memulai pembangunan pabriknya di Indonesia

"Terkait pengolahan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah. Sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengolahan kelapa terbesar di dunia," kata Rosan. Perusahaan China ter-

sebut rencananya berinvestasi dengan membangun pabrik pengolahan kelapa di beberapa kota di Indonesia. Sebagai tahap awal, nilai investasi di salah satu kota mencapai 100 juta dolar AS.

■ Danial

Peneliti: Revisi Proyeksi IMF Peluang RI Percepat Pemerataan

Jakarta, HanTer - Peneliti Sosial Ekonomi Yayasan Kekal Berdikari Jan Prince Permata menilai revisi Dana Moneter Internasional (IMF) atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025, dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen, menjadi peluang Indonesia mempercepat pemerataan.

Jan Prince Permata menilai revisi itu bukan hanya menandakan ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga menjadi peluang penting untuk memperkuat pemerataan hasil pembangunan. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Jan menyebutkan bahwa peningkatan proyeksi tersebut mencerminkan pengakuan global atas konsistensi transformasi ekonomi Indonesia.

"Transformasi ekonomi Indonesia kini mulai memperlihatkan hasil nyata. Dari penguatan industri berbasis hilirisasi, digitalisasi UMKM, hingga stabilitas makroekonomi pasca transisi politik. Dunia mulai memperhitungkan

Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru," ujar Jan.

IMF mencatat bahwa perbaikan outlook Indonesia didorong oleh stabilitas politik usai pemilu, dorongan hilirisasi sektor mineral dan perkebunan, serta ekspansi ekonomi digital.

Namun, risiko eksternal seperti konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi dan potensi kenaikan tarif global tetap membayangi.

Meski menyambut positif optimisme IMF, Jan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat belum tentu dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pertumbuhan harus inklusif. Pemerintah harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin, hampir miskin, dan kelas menengah rentan. Pemerataan ekonomi dan penguatan SDM adalah kunci," kata dia.

Menurut dia, pemerintah Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum strategis untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya mam-

pu tumbuh cepat, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan.

"Ini adalah kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi yang tidak hanya cepat tumbuh, tetapi juga adil dan tahan banting. Kita punya bonus demografi, ekosistem investasi yang kondusif, dan jaringan perdagangan baru. Tapi kalau tidak disertai proteksi sosial dan pemberdayaan, kita akan tumbuh tanpa arah," tegasnya.

Dalam lanskap regional, Indonesia kini bersaing ketat dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menarik investasi relokasi dari barat, di tengah perubahan arah ekonomi China menuju konsumsi domestik dan ekspansi teknologi India.

Sebagaimana diketahui, dalam laporannya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,0 persen pada 2025, dan meningkat tipis menjadi 3,1 persen pada 2026, sedikit lebih optimis dibanding proyeksi pada edisi April lalu.

■ Danial

PENGUMUMAN BERITA PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH PT. KHAND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah NO. 55 Pasal 19 (1) tahun 2022 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan ini PT Khand Environmental Solutions yang merupakan Perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia dengan NPWP: 081.482.897.6-043.000 dan berkedudukan di The Kensington Office Tower Lantai 15 Jalan Boulevard No 01, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Jakarta Utara, no telepon 021-31146646, mengumumkan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 208.680.000 (Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial sebagai kerugian Perusahaan kami. Rincian nama Debitur dan nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihkan adalah sebagai berikut:

- CV Central Mandiri Utama (NPWP: 03.317.514.2-404.000) senilai Rp.175.380.000 (Inv KES2205001 & KES2206002) yang akan kami Net Off dengan hutang kami senilai Rp. 13.625.000 (Inv 524 & 525).
- Didin Wahyudin (NIK: 3201240904710001) senilai Rp. 33.300.000 (Inv KES2302002)

Jika ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tambahan atas penghapusan piutang dimaksud, dapat menghubungi kami pada Alamat dan nomor telepon diatas.

Jakarta, 31 Juli 2025
Direksi PT. Khand Environmental Solutions

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025.

Jakarta, 31 Juli 2025

EMITEN: WIKI
WALI AMANAT: BANK MEGA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025.

Jakarta, 31 Juli 2025

EMITEN: WIKI
WALI AMANAT: BANK MEGA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025.

Jakarta, 31 Juli 2025

EMITEN: WIKI
WALI AMANAT: BANK MEGA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025.

Jakarta, 31 Juli 2025

EMITEN: WIKI
WALI AMANAT: BANK MEGA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025.

Jakarta, 31 Juli 2025

EMITEN: WIKI
WALI AMANAT: BANK MEGA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK